

Konflik Tapal Batas antara Desa Tanjung Telang dengan Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih

Muchlis Minako ¹, Rizky Savella ²

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 1; muchlisminako@radenfatah.ac.id

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2; rizkysavella@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Konflik Perbatasan Antar Desa Tanjung Telang Dengan Desa Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih”. Masalah dengan penelitian ini adalah mengapa hal itu terjadi. Konflik batas antara Desa Tanjung Telang dan Desa Payuputat dan resolusi dari konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan terjadinya konflik tapal batas antara desa Tanjung Telang dan Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang unit analisisnya adalah masyarakat Desa Tanjung Telang dan Payuputat. Data dikumpulkan oleh observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terjadi penyeberangan perbatasan antara desa Tanjung Telang dengan desa Payuputat dilatar belakangi beberapa faktor, yaitu pertama faktor sejarah, kedua faktor perbedaan persepsi, tiga faktor ekonomi.

Keywords: Konflik, Tapal Batas.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1879>

*Correspondensi: Muchlis Minako,
Rizky Savella

Email: muchlisminako@radenfatah.ac.id,
rizkysavella@gmail.com

Received: 12-11-2023

Accepted: 17-12-2023

Published: 28-01-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research is entitled “Border Conflict Between Tanjung Telang Village and Payuputat Village, West Prabumulih District, Prabumulih City”. The problem with this research is why it happened Boundary conflict between Tanjung Telang Village and Payuputat Village and resolution of the conflict. The purpose of this study is to explain the occurrence of boundary conflicts between the village of Tanjung Telang and Kelurahan Payuputat, West Prabumulih District, Prabumulih City. This research is a qualitative research whose unit of analysis is the people of Tanjung Telang and Payuputat villages. Data collected by direct observation, in-depth interviews with informants. The research method used is qualitative which consists of three activity streams, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the conflict occurred at the border crossing between the village of Tanjung Telang and the village of Payuputat due to several factors, namely the first historical factor, the second factor of different perceptions, and three economic factors.

Keywords: Conflict, Boundary

Pendahuluan

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting keberadaannya saat ini dan jumlahnya populasinya terus bertambah sementara ketersediaan lahan sangat penting. Kepemilikan tanah adalah realitas yang tidak ada tidak pernah berakhir di negara ini dan akhirnya menjadi konflik (Ichsan, 2021). Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena dalam masyarakat agraris tanah merupakan komoditi dengan harga yang mahal (Tripathy, 2022). Orang yang memilikinya diberi status tinggi orang yang memiliki tanah adalah yang paling penting dan berharga bagi masyarakat petani, sehingga tidak mengherankan kegiatan lain dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah selalu penting (Hari waluyo, 1190).

Kehidupan masyarakat menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu menyebabkan gerakan tanah yang menyempit. Apalagi lahan juga daerah pedesaan di mana semua kegiatan ekonomi bergantung pada tanah, seperti perkebunan, persawahan, peternakan dan lain-lain, semuanya tergantung pada bagian dari wilayah mereka. Ditambah lagi dengan ketidakjelasan letak batas kawasan yang sebelumnya hanya dibatasi oleh pepohonan yang tidak jelas bagi masyarakat (Karki, 2022). Bersama Waktu terus berjalan dan tumbuh generasi yang tidak semua orang tahu bahwa batas antara desa Tanjung Telang dan desa Payuputat dibatasi dengan pohon maka, perubahan pendapat juga semakin meningkat, akibatnya, kedua kelompok orang ini kembali berkonflik.

Setelah beberapa tahun konflik terselesaikan, kini Pada tahun 2012, konflik kembali meletus antara dua kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Konflik berdasarkan tapal batas tersebut kini menjadi konflik kembali (Donato, 2019). Dua kelompok masyarakat ini didasarkan pada perebutan sumber daya produksi, yang digunakan sebagai lahan perkebunan sebagai sumber daya alam Produksi, dimana luas lahan yang dipersengketakan adalah 523 hektar (Borooah, 2020). lahan ini terletak di antara dua desa dan tanah ini digunakan sebagai perkebunan karet oleh masyarakat karena pemilik tanah tidak mengolahnya. Konflik ini telah muncul kembali karena orang ingin memiliki tanah karena Sang Pemilik ingin menjual tanahnya untuk membantu masyarakat secara sistematis Setiap kepala keluarga berhak atas dua hektar dari pembagian pinjaman lahan untuk perkebunan karet. Berdasarkan apa dalam hal yang mempengaruhi perekonomian masyarakat, masyarakat menganggap tanah memasuki desa mereka (Tao, 2021). Kedua kelompok masyarakat ini memperebutan tanah di perbatasan ini dikatakan sebagai lahan perkebunan mereka.

Literatur

Penelitian Hendrik Risman yang berjudul Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq). Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah kabupaten Kutai Barat menyelesaikan konflik perbatasan sebuah desa di Kabupaten Kutai Barat pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai dan Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik perbatasan Desa ini terletak di antara Desa Muhur dan Desa Kaliq, Sang Sang (Risman, 2015).

Penelitian Bakri La Suhu yang berjudul *Batas Daerah Dalam Pusaran Konflik Di Provinsi Maluku Utara (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah)*. Penelitian ini membahas tentang menganalisis secara mendalam penyebab terjadinya sengketa perbatasan antara Pemerintah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah serta menganalisis bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tapal batas antara Pemerintah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah (Suhu, 2018)

Penelitian Sri Rahmadani yang berjudul *Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar*. Penelitian ini membahas tentang upaya dan keberhasilan LSM sebagai mediator dalam menyelesaikan (Rahmadani, 2015) konflik kedua nagari untuk membentuk perwakilan kelompok yang sangat menentukan keberhasilan mediasi. Selain itu dalam tulisan ini juga menjelaskan alasan mengapa LSM tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik kedua nagari tersebut (Rahmadani, 2015).

Metode

Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menggunakan pengumpulan data yaitu observasi dengan cara peneliti melihat kegiatan dilapangan melakukan wawancara dengan mengarah beberapa narasumber yang dibutuhkan serta dokumentasi berbentuk berkas atau data yg didapatkan (Vibha, 2021). Data yang di dapat kemudian diolah dengan cara menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyelesaian konflik tapal batas ini menggunakan teori Moore ada lima, yaitu penghindaran (pihak yang berkonflik). Menghindari satu sama lain untuk menghindari kekerasan dalam konflik), pemecahan masalah informal (bahwa masalah konflik diselesaikan dengan informal), negosiasi (pihak yang berkonflik bernegosiasi), mediasi (Mediasi dengan melibatkan pihak ketiga), tata cara penyelesaian konflik administratif (Munculnya penyedia resolusi konflik lainnya) (Kende, 2022; Zheng, 2022).

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi Konsep

Konflik merupakan gejala yang terjadi pada setiap masyarakat. Konflik terhubung dengan masyarakat dimana akan selalu ada konflik selama masyarakat itu ada, sehingga tidak mungkin untuk menyelesaikan konflik (Jamal, 2023). Konflik dapat didefinisikan sebagai akibat dari pandangan individu atau kelompok

Kelompok mempersepsikan diri mereka berbeda dan perbedaan itu menimbulkan konflik ide atau kepentingan, sehingga kepentingan tersebut menjadi konflik sehingga mengganggu keinginan atau tujuan individu atau kelompok lain.

Pendekatan konflik berpangkal pada anggapan-anggapan dasar sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat (kelompok) selalu berproses perubahan tak terbatas atau dengan kata lain perubahan sosial merupakan gejala pada setiap masyarakat atau masyarakat kelompok sosial

2. Setiap masyarakat (kelompok) mengandung konflik dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.
3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang lain.

Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan adaptasi dapat mewakili peran positif dalam masyarakat (Acar, 2019). Pada dasarnya, perspektif teoretis Coser adalah upaya untuk menjembatani kesenjangan antara teori fungsional dan teori konflik, hal ini dapat dilihat dari fokus pada fungsi integral konflik dalam sistem sosial (Alhuzail, 2021). Coser setuju tentang bagaimana konflik sosial bekerja dalam sistem hubungan sosial, terutama dalam kaitannya dengan institusi yang kaku, kemajuan teknologi, dan produktivitas, dan kemudian dengan konsep relasional antara konflik dan perubahan sosial (Sofyan, 2010)

Tapal Batas adalah batas atau garis pemisah (dari unit administratif atau antara unit geografis yang berbeda, baik fisik maupun budaya) (Besar, 2012). Konflik merupakan suatu bentuk interaksi antara satu orang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lainnya dimana masing-masing pihak terpisah sadar, siap, mungkin dan mampu tindakan timbal balik antara pertanyaan yang diajukan dan pertanyaan yang di konflik satu sama lain karena suatu alasan sering terjadi (Maskulino, 2021). Kata konflik memiliki makna negatif yang biasanya diartikan sebagai lawan kata konsep kerja sama, harmoni dan perdamaian (Lambrecht, 2018). Jadi "konflik" dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dll yang paling tidak melibatkan minimal dua pihak atau lebih. Konflik antar kelompok sering muncul karena persaingan.

Prasangka dan kebencian, baik pribadi, politik atau ideologis yang melatarbelakanginya. Kelompok luar dapat menciptakan struktur yang saling bertentangan dan hubungan sosial yang tidak lurus (Permana, 2020). Asumsi yang mendasari Konflik karena semua aktor dalam organisasi saling melekat satu sama lain tujuan tertentu, dan aktor tersebut memiliki sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa aktor dari kelompok yang berbeda bertemu kondisi situasional tertentu yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik sosial yang terbuka (Neudert, 2020).

Masyarakat dan konflik adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan tentu saja, sejauh terjadinya interaksi dan kerja sama konfliktual Ada berbagai bentuk seperti konflik antarpribadi, konflik antar pribadi Kelompok, konflik antar organisasi, dll (Guo, 2022). Konflik pada prinsipnya Ini memiliki elemen yang berbeda, yaitu dua pihak yang terlibat tujuan yang berbeda tindakan dan situasi yang menciptakan konflik pertentangan (Swarnokar, 2020). Konflik sering dipandang sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan stabilitas yang mengganggu. Namun pada prinsipnya ada sisi lain dari konflik tersebut kekuatan positif yang mewakili proses perubahan. Oleh

karena itu, keberadaan konflik harus disadari, disikapi, dikelola dan ditransformasikan menjadi satu kekuatan untuk membawa perubahan positif.

B. Konflik Tapal Batas antara Desa

Konflik tapal batas antara Desa Tanjung Telang dan Kelurahan Payuputat, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih termasuk konflik laten di mana situasi dengan banyak masalah, sifatnya tersembunyi dan harus dibawa ke permukaan untuk ditanggulangi (Ogryzek, 2021). Pada dalam konflik semacam itu, kehidupan masyarakat masih tampak stabil dan harmonis tidak dapat dikatakan jaminan bahwa tidak akan ada permusuhan di masyarakat dan pertentangan, seperti konflik antara Desa Tanjung Telang dan Kelurahan Payuputat terlihat serasi dan halus dari luar seolah-olah tidak ada gangguan atau konflik antara kedua desa tersebut (Atmadja, 2018). Bahkan, ada konflik laten di masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa limit tidak konsisten wilayah antara Desa Tanjung Telang dan Kelurahan Payuputat, terjadi karena perbedaan persepsi antara keduanya. Pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menyadari isu konflik yang sesungguhnya (Yamazaki, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa persoalan konflik tapal batas wilayah antara Desa Tanjung Telang dan Kelurahan Payuputat tidak terjadi konflik destruktif antara kedua daerah sama halnya dengan konflik nonrealistic. "Dalam konflik destruktif pihak-pihak yang berkonflik tidak fleksibel atau kaku untuk tujuan ini konflik yang didefinisikan secara sempit yaitu memukul satu sama lain lain yang ada interaksi konflik berkepanjangan, siklus konflik yang tidak terkendali karena menghindari konflik interaksi para pihak mereka yang terlibat dalam konflik membentuk spiral semakin lama pihak-pihak tersebut terlibat dalam konflik tersebut (Wang, 2021). pihak-pihak itu terlibat dalam konflik dan menerapkan teknik manajemen konflik kompetitif, ancaman, konfrontasi, kekuasaan, agresi, dan sangat sedikit digunakan menciptakan negosiasi.

Upaya untuk menyelesaikan konflik bermuara pada bagaimana usaha mencoba sehingga konflik berada dalam situasi yang optimal untuk terjadinya konflik mencegah penyumbatan, merangsang kreativitas, memungkinkan melarikan diri, melepaskan ketegangan dan mulai perubahan (Rosin, 2020). Konflik jika tidak diselesaikan dengan benar dan menyeluruh itu mengganggu keseimbangan sumber daya dan memperkeruh hubungan antara orang-orang yang terlibat. Kesalahan internal dengan konflik dapat memiliki konsekuensi bencana Oleh karena itu, menangani konflik harus serius (Mohanty, 2019).

Dalam proses penyelesaian konflik, konflik harus dipahami karena faktor yang berbeda atau kepentingan yang berbeda dalam setiap konflik, maka metode yang digunakan dalam konflik juga bervariasi sesuai dengan keadaan. Penyelesaian konflik yang tepat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk penyebab konflik dan hubungan khusus antara pemerintah dan pihak yang bersangkutan terlibat konflik, sehingga

langkah-langkahnya harus matang akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan kasus ini Pemerintah Desa Tanjung Telang dan Kelurahan Payuputat adalah resolusi konflik kewenangan penuh dalam proses penyelesaian perkara (Pulubuhu, 2018). Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan konflik tapal batas antar Desa Tanjung Telang dan Kelurahan Payuputat Upaya Pemerintah yaitu negosiasi, fasilitasi, mediasi. Pemerintah Kecamatan Prabumulih bernegosiasi dan mendorong langkah-langkah mediasi terhadap konflik disponsori oleh pemerintah kabupaten terhadap konflik tapal batas yang terjadi di Desa Tanjung Telang dan Kelurahan Payuputat.

Simpulan

Konflik dapat didefinisikan sebagai akibat dari pandangan individu atau kelompok-kelompok mempersepsikan diri mereka berbeda dan perbedaan itu menimbulkan konflik ide atau kepentingan, sehingga kepentingan tersebut menjadi konflik sehingga mengganggu keinginan atau tujuan individu atau kelompok lain. Konflik merupakan suatu bentuk interaksi antara satu orang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lainnya dimana masing-masing pihak terpisah sadar, siap, mungkin dan mampu tindakan timbal balik antara pertanyaan yang diajukan dan pertanyaan yang di konflik satu sama lain karena suatu alasan sering terjadi.

Masyarakat dan konflik adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan tentu saja, sejauh terjadinya interaksi dan kerja sama konfliktual Ada berbagai bentuk seperti konflik antarpribadi, konflik antar pribadi Kelompok, konflik antar organisasi, dan lain-lain. Konflik pada prinsipnya Ini memiliki elemen yang berbeda, yaitu dua pihak yang terlibat tujuan yang berbeda tindakan dan situasi yang menciptakan konflik pertentangan.

Daftar Pustaka

- Acar, Y. G. (2019). Village guards as “in between” in the Turkish-Kurdish conflict: Re-examining identity and position in intergroup conflict. *Journal of Social and Political Psychology*, 7(2), 925–940. <https://doi.org/10.5964/jspp.v7i2.854>
- Alhuzail, N. A. (2021). Social work in a conflict context: Challenges facing social workers with indigenous inhabitants of unrecognised villages in Israel. *International Journal of Social Welfare*, 30(1), 97–105. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12427>
- Atmadja, A. T. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1).
- Besar, K. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Boroah, V. K. (2020). Conflict, caste and resolution: a quantitative analysis for Indian villages. *Indian Growth and Development Review*, 13(2), 319–338. <https://doi.org/10.1108/IGDR-08-2019-0087>

- Donato, A. De. (2019). Herders' water practices and conflicts in a Palestinian village (Wādī Fūkīn, West Bank). *Nomadic Peoples*, 23(2), 261–281. <https://doi.org/10.3197/np.2019.230206>
- Guo, H. (2022). Social exclusion and conflict in a rural tourism community: A case study from Likeng Village, China. *Tourist Studies*, 22(1), 42–60. <https://doi.org/10.1177/14687976211039067>
- Ichsan, A. C. (2021). Land Use Conflict Mapping in Mount Rinjani National Park Pesangrahan Village East Lombok District. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 891(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/891/1/012029>
- Jamal, A. (2023). Developing village in the former conflict region of Indonesia through social and economic inclusion: Evidence from Aceh. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2178521>
- Karki, D. (2022). Human-Wildlife Conflicts in Paschim Kusaha Village of Koshi Tappu Wildlife Reserve, Sunsari District, Nepal. *Journal of Resources and Ecology*, 13(6), 1022–1029. <https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.06.007>
- Kende, J. (2022). Past and Present Intergroup Contact and Conflict Among Inhabitants of Former Mixed Villages of Cyprus: The Role of Individual and Collective Experiences in Predicting Attitudes and Trust. *Political Psychology*, 43(4), 751–768. <https://doi.org/10.1111/pops.12791>
- Lambrecht, T. (2018). An old poor law on the Continent? Agrarian capitalism, poor taxes, and village conflict in eighteenth-century coastal Flanders. *Economic History Review*, 71(4), 1173–1198. <https://doi.org/10.1111/ehr.12611>
- Maskulino. (2021). Mitigation of Human-Orangutan Conflict in Orangutan Reintroduction Area at Suo-suo Village, Buffer Zone of Bukit Tigapuluh National Park. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 715(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/715/1/012076>
- Mohanty, A. (2019). Exploring community resilience and early warning solution for flash floods, debris flow and landslides in conflict prone villages of Badakhshan, Afghanistan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 33, 5–15. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.07.012>
- Neudert, R. (2020). Understanding Causes of Conflict Over Common Village Pastures—A Comparative Analysis of Property Rights in Azerbaijan and Georgia. *Society and Natural Resources*, 33(3), 347–367. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1704329>
- Ogryzek, M. (2021). Public participation as a tool for solving socio-spatial conflicts of smart cities and smart villages in the sustainable transport system. *Remote Sensing*, 13(23). <https://doi.org/10.3390/rs13234821>
- Permana, S. (2020). Traditional conservation and human-primate conflict in Ujungjaya Village Community, Ujung Kulon, Banten, Indonesia. *Biodiversitas*, 21(2), 521–529. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210213>
- Pulubuhu, D. A. T. (2018). Understanding the perspectives of village leaders and institutions in transforming social conflict into peace and health. *Indian Journal of*

- Public Health Research and Development*, 9(3), 314–318. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00244.9>
- Rahmadani, S. (2015). *Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar*.
- Risman, H. (2015). *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq)*.
- Rosin, Z. M. (2020). Reduced biodiversity in modernized villages: A conflict between sustainable development goals. *Journal of Applied Ecology*, 57(3), 467–475. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13566>
- Sofyan. (2010). *Memahami Akar dan Ragam Teori Konflik*.
- Suhu, B. La. (2018). *Batas Daerah dalam Pusaran Konflik di Provinsi Maluku Utara (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah)*.
- Swarnokar, S. C. (2020). Conflict of resource use among different livelihood group in coastal villages of SouthWestern Bengal Delta, Bangladesh. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 15(7), 1089–1099. <https://doi.org/10.18280/IJSDP.150713>
- Tao, J. (2021). Conflict, fortification, and settlement patterns: A study of the vernacular villages in Guangdong, South China. *War in History*, 28(2), 237–262. <https://doi.org/10.1177/0968344519871141>
- Tripathy, B. R. (2022). Demographic Circumstances and People's Sentiments towards Elephants in the Human–Elephant Conflict Hotspot Villages of Keonjhar Forest Division in Eastern India. *Diversity*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/d14050311>
- Vibha, G. (2021). Effectiveness of solar fence in reducing human–elephant conflicts in Manchahalli village, Mysuru, Karnataka, India. *Current Science*, 120(4), 707–711. <https://doi.org/10.18520/cs/v120/i4/707-711>
- Wang, M. (2021). Community participation and residents' support for tourism development in ancient villages: The mediating role of perceptions of conflicts in the tourism community. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su13052455>
- Yamazaki, S. (2018). Intra-village and inter-village resource use conflict in Indonesia: The case of the Kei Islands. *Ocean and Coastal Management*, 155, 50–59. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.01.022>
- Zheng, J. (2022). Research on the spatial behavior conflict in suburban village communities based on GPS tracking and cognitive mapping. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 21(6), 2605–2620. <https://doi.org/10.1080/13467581.2021.1971680>